ABSTRAK

Putri Juliani Br Tarigan 3212411022, "**Tinjauan Hukum Terhadap Pembinaan Gelandangan Berdasarkan Prinsip Keadilan Sosial (Studi Kebijakan Dinas Sosial Kabanjahe)**" Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pembinaan gelandangan yang sejalan dengan prinsip keadilan sosial di Dinas Sosial Kota Kabanjahe, dan menganalisis Faktor apa saja yang menjadi penyebab tingginya angka gelandangan di Kota Kabanjahe. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan metode normatif empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek pada penelitian ini yaitu Dinas Sosial Kota Kabanjahe. Pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Data primer berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembinaan gelandangan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabanjahe telah memiliki landasan hukum yang jelas, baik yang tercantum dalam Pasal 34 ayat 1 UUD 1945, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, maupun peraturan daerah. Dari sisi normatif, kebijakan tersebut sudah sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila, yang menekankan pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan kesempatan, dan perlakuan yang adil terhadap kelompok rentan. Meski demikian, pelaksanaanya di lapangan masih menemui berbagai kendala, antara lain keterbatasan anggaran, minimnya tenaga pendamping, kurangnya fasilitas, serta lemahnya penyebaran informasi mengenai program. Akibatnya, tidak semua gelandangan memperoleh akses dan manfaat yang sama dari program pembinaan sebagian memang telah merasakan bantuan berupa kebutuhan pokok, pelatihan keterampilan, serta dukungan psikososial, tetapi hasilnya masih bersifat sementara dan belum mampu meningkatkan kemandirian secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Tinjauan Hukum, Pembinaan gelandangan, Prinsip Keadilan Sosial.

THE Character Building UNIVERSITY

ABSTRACT

Putri Juliani Br Tarigan 3212411022, "Legal Review of Homeless Rehabilitation Based on the Principle of Social Justice (Policy Study of the Kabanjahe Social Service)" Department of Pancasila and Citizenship Education, Faculty of Social Sciences, Medan State University**.**

The purpose of this study is to determine how the policy on the rehabilitation of vagrants is in line with the principle of social justice at the Kabanjahe City Social Services Agency, and to analyze the factors that cause the high number of vagrants in Kabanjahe City. This research uses descriptive research and normative empirical methods with a qualitative descriptive approach. The subject of this research is the Kabanjahe City Social Services Agency. The data collection methods used are primary and secondary data. Primary data consists of interviews, observations, and documentation. The data analysis methods used in this research are data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study show that the homeless rehabilitation policy implemented by the Kabanjahe Social Services Agency has a clear legal basis, as stated in Article 34 paragraph 1 of the 1945 Constitution, Law Number 11 of 2009 concerning social welfare, and regional regulations. From a normative perspective, the policy is in line with the principle of social justice in the fifth principle of Pancasila, which emphasizes the fulfillment of basic needs, equal opportunities, and fair treatment of vulnerable groups. However, the implementation In the field, there are still various obstacles, including budget constraints, a lack of support staff, inadequate facilities, and poor dissemination of information about the program. As a result, not all homeless people have equal access to and benefit from the program. Some have received assistance in the form of basic necessities, skills training, and psychosocial support, but the results are still temporary and have not been able to improve their independence in a sustainable manner.

Keywords: Legal Review, Homeless Rehabilitation, Principles of Social Justice.